



LURAH HARGOTIRTO

PERATURAN KALURAHAN HARGOTIRTO

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

HARGOTIRTO

TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



LURAH HARGOTIRTO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN KALURAHAN HARGOTIRTO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN HARGOTIRTO
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH HARGOTIRTO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam

- Kewenangan Desa;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
 26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan kalurahan/ Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat;
 27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan;
 28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
 30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;
 32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa tahun Anggaran 2024;
 33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintah Kalurahan;
 34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
 35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 36. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 8 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kalurahan Hargotirto;
 37. Peraturan Kalurahan Hargotirto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Gendhis Manis Hargotirto;
 38. Peraturan Kalurahan Hargotirto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun 2012-2027;
 39. Peraturan Kalurahan Hargotirto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Hargotirto Tahun 2024;
 40. Peraturan Kalurahan Hargotirto Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2024; dan

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 337/C/ 2022 tentang Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelola Keuangan Kaluraha, dan Tim Pelaksana Kegiatan di Kalurahan;

2. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 288C/2023 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga

- Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kewenangan Desa;
3. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 332C/2023 tentang Honoarium unsur pembantu penyelenggara Pemerintah Kalurahan; dan
4. Keputusan Panewu Kokap Nomor 29 Tahun 2023 tertanggal 8 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Hargotirto Kapanewon Kokap Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Hargotirto Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOTIRTO
dan
LURAH HARGOTIRTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN HARGOTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN HARGOTIRTO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Hargotirto Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	3.237.812.891,00
2. Belanja Desa	Rp	3.505.225.805,00
Surplus/(Defisit)	(Rp	267.412.914,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	267.412.914,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan (3.1 – 3.2)	Rp	267.412.914,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

- Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
- a. APB Kalurahan;
 - b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
 - c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun

anggaran sebelumnya *(jika ada)*.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun

berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Hargotirto.

Ditetapkan di : Kalurahan Hargotirto

Pada tanggal : 18 Desember 2023

Lurah Hargotirto,

cap/ttd

TUKIYO

Diundangkan di : Kalurahan Hargotirto

Pada tanggal : 18 Desember 2023

Carik Hargotirto

cap/ttd

EKO PURWANTI

LEMBARAN KALURAHAN HARGOTIRTO NOMOR TAHUN 2023



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOTIRTO
DAN
LURAH HARGOTIRTO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN HARGOTIRTO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 10/KB/BPK/2023
NOMOR : 10/ KB/ XII/2023

Pada hari ini : Kamis tanggal Tujuh Bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga,
bertempat di Balai Kalurahan Hargotirto, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan
Kalurahan Hargotirto Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Hargotirto Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024;
menjadi

Peraturan Kalurahan Hargotirto Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan
Permusyawaratan Kalurahan Hargotirto Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo dan
Lurah Hargotirto Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN HARGOTIRTO

cap/ttd

(MUJIONO, S.Pd.I)

LURAH HARGOTIRTO

cap/ttd

(TUKIYO)

SALINAN
INI TELAH DIPERIKSA SESUAI DENGAN ASLINYA

SINUNG WIDODO
PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.433.605,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.111.363.526,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	29.015.760,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.237.812.891,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.341.797.916,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	921.305.899,00	
5.3.	Belanja Modal	1.212.070.550,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.051.440,00	
	JUMLAH BELANJA	3.505.225.805,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(267.412.914,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	267.412.914,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	267.412.914,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	267.412.914,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Plawangan, 18 December 2023

Lurah

cap/ ttd

TUKIYO

SALINAN
 INITELAH DIPERIKSA

SINUNG WIDODO
 PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN HARGOTIRTO
NOMOR 00 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.433.605,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.111.363.526,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	29.015.760,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.237.812.891,00	
	5.	BELANJA		
		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>1.793.987.169,00</u>	
	1.1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.490.979.637,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	96.791.424,00	ADD, PBK
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	96.791.424,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.133.690.756,00	ADD, PBK
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	1.133.690.756,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.115.736,00	PAD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	37.115.736,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	69.302.921,00	DLL, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.302.921,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	74.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	74.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	3.739.800,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.739.800,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.000.000,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41.139.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.139.000,00	
	1.2.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	107.984.050,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	107.984.050,00	PAD, SLP
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	107.984.050,00	
	1.3.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	50.972.864,00	
	1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	25.327.364,00	SLP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.327.364,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	25.645.500,00	SDD, SLP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.645.500,00	
1.4.		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	127.551.618,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang)	25.874.100,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.874.100,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler)	6.416.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.416.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	11.776.800,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.776.800,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter)	33.190.464,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.190.464,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.247.400,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.247.400,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang	4.845.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.845.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo	1.042.054,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.042.054,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.155.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.205.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.950.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili	32.004.800,00	ADD, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.004.800,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.499.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	16.499.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.499.000,00	
2		<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>1.522.417.996,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	379.648.696,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian	146.760.900,00	DDS, PBH, SDD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.760.900,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya)	6.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/	199.143.400,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	199.143.400,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	27.744.396,00	PBH, SDD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.744.396,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	247.647.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	224.696.200,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	224.037.400,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	658.800,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain)	4.254.900,00	SDD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.254.900,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.245.900,00	DDS, SDD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.245.900,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9.450.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	893.334.300,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	391.928.400,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	391.928.400,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	341.434.600,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	341.434.600,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	159.971.300,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	159.971.300,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1.788.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D	1.788.000,00	SDD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.788.000,00	
3		<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>121.091.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	25.661.200,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/pat	15.536.200,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.536.200,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi p	10.125.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.125.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.169.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.400.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup	9.769.000,00	PBH, SDD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.769.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	40.334.200,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	23.862.600,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.862.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	16.471.600,00	SDD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.471.600,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	36.927.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.390.300,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.390.300,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.429.400,00	SDD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.429.400,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	14.107.300,00	SDD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.107.300,00	
4		<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>37.677.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.926.400,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan **	5.926.400,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.926.400,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.865.000,00	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	12.865.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.865.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	4.846.400,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	4.846.400,00	SDD
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.846.400,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	14.040.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif (pengrajin pedagang i	14.040.000,00	DLL
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	
5		<u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u>	<u>30.051.440,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.075.680,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	3.075.680,00	PAD, SDD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.075.680,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	8.975.760,00	
5.2.00		Keadaan Darurat	8.975.760,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.975.760,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.505.225.805,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(267.412.914,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	267.412.914,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	267.412.914,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Plawangan, 18 December 2023

Lurah

cap/ ttd

TUKIYO

